



PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DESA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM UPAYA PENCAPAIAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA (Studi pada Purna Perempuan Pekerja Migran Indonesia-Desa Druju-Kabupaten Malang)

Eny Yuniriyanti¹⁾, Ririn Sudarwati²⁾, Bambang Nurdewanto³⁾

^{1,2)} Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Merdeka Malang

³⁾ Fakultas Teknologi Informasi Universitas Merdeka Malang

Email: eny.yuniriyanti@unmer.ac.id

Abstrak

Perempuan pedesaan sangat tergantung hidupnya pada lingkungan alam yang ada disekitar mereka untuk dapat memenuhi kelangsungan hidup mereka dan juga keluarga. Namun pada kenyataannya banyak aktivitas sumberdaya desa yang tidak memperdulikan peran perempuan sehingga semakin hilangnya akses dan kontrol perempuan terhadap sumberdaya yang ada didesa dan terpinggirkan dari proses pembangunan. Analisis terhadap kondisi purna Pekerja Migran Indonesia -Perempuan (PMI-P) menggunakan metode GIS (*Geographic Information System*) dan analisis faktor dalam upaya menentukan program pemberdayaan purna Pekerja Migran Indonesia -Perempuan (PMI-P) yang sesuai dengan kearifan lokal. Perempuan sebagai ibu rumah tangga selain perannya membantu suami mencari tambahan nafkah untuk keluarganya juga bertanggungjawab terhadap pengelolaan ekonomi keluarga. Mereka berusaha dengan berbagai keterbatasan mengelolanya sehingga keluarganya tetap bisa makan layak dan bertahan hidup. Dapat dikatakan wanita mempunyai peran penting dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki Desa Druju, peneliti menawarkan dua pilihan usaha yaitu pengolahan produk olahan berbahan batik dan produk olahan berbahan jagung. Dengan analisis faktor diperoleh hasil bahwa responden/perempuan Desa Druju lebih memilih usaha pengolahan produk berbahan batik. Berdasarkan modal pemberdayaan yang dimiliki oleh Desa Druju, maka strategi pemberdayaan perempuan purna pekerja migran yang sesuai adalah strategi Aras Mezzo, dengan tujuan pemberdayaan terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUB) produk olahan berbahan batik.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Kearifan Lokal, Kelompok Usaha Bersama

Abstract

Rural women are very dependent on the natural environment around them to be able to fulfill their survival and also family. However, in reality, there are many village resource activities that do not pay attention to the role of women so that the loss of access and control of women over resources in the village and marginalized from the development process. Analysis of the conditions of post-Indonesian Migrant Workers-Women (PMI-P) using the GIS (Geographic Information System) method and factor analysis in an effort to determine the post-empowerment programs of Indonesian Migrant Workers-Women (PMI-P) in accordance with local wisdom. Women as housewives in addition to their role in helping husbands to find additional living for their families are also responsible for managing the family economy. They try with various limitations to manage it so that their families can still eat well and survive. It can be said that women have an important role in efforts to improve family food security. Based on the local wisdom of Druju Village, the researcher offers two business options, namely the processing of processed batik products and processed



products made from corn. With the analysis of the factors obtained the results that the respondents / women Druju Village prefer processing products made from batik. Based on the empowerment capital owned by Druju Village, the appropriate strategy for empowering women migrant workers is the Aras Mezzo strategy, with the aim of empowering the formation of a Joint Business Group (KUB) of processed products made from batik.

Keywords: *Empowerment, Local Wisdom, Joint Business Groups*

I. PENDAHULUAN

Ketahanan Pangan nasional merupakan isu strategis bagi Indonesia. Upaya Pemantapan ketahanan pangan tidak terlepas dari penanganan kerawanan pangan karena kerawanan pangan bisa menjadi penyebab instabilitas ketahanan pangan. Kerawanan pangan dapat disebabkan karena kendala yang bersifat kronis seperti terbatasnya sumber daya dan kemampuan, maupun yang bersifat sementara seperti tertimpa musibah atau bencana alam.

Dalam usaha mewujudkan ketahanan pangan dan untuk menyatukan upaya dan gerak langkah antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan nasional, Pemerintah telah menetapkan Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2010-2014 yang menegaskan, bahwa tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang pada tingkat rumah tangga, daerah, nasional sepanjang waktu dan merata melalui pemanfaatan sumberdaya dan budaya lokal, teknologi inovatif dan peluang pasar, serta memperkuat ekonomi pedesaan dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Perempuan sebagai bagian komponen bangsa ikut berperan serta dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan terutama ketahanan pangan keluarga /rumah tangga. Masalah penelitian Perempuan dalam pembangunan merupakan isu global yang menjadi perhatian semua bangsa termasuk Indonesia. Kondisi tersebut membawa

dampak positif karena upaya peningkatan peranan perempuan tidak lagi dilihat sebagai upaya asal-asalan tanpa landasan ilmu, tetapi justru tumbuh kesadaran bahwa peningkatan peranan wanita juga memerlukan bidang ilmu yang menopangnya. Berbagai konsep dan pendekatan untuk program peranan wanita dalam pembangunan diperkenalkan dan dicoba untuk diterapkan dalam proyek-proyek pemberdayaan wanita .

Hasil Penelitian Yuniriyanti (2017) mengungkapkan bahwa: perempuan mempunyai peran penting dalam ketahanan pangan keluarga, karena perempuan melakukan sebagian besar pekerjaan mengolah dan menyiapkan makanan keluarganya. Upaya ketahanan pangan yang oleh perempuan sebagai ibu rumah tangga supaya terhindar dari rawan pangan, adalah: mengalihkan bahan pokok utama beras ke jagung, sering mengkonsumsi tahu/tempe dari pada daging/ikan, memasak sayuran dari tanaman sendiri. Pengolahan pangan yang sering dilakukan hanyalah dengan merebus atau menggoreng saja tanpa ada diversifikasi sehingga nilai gizinya relatif tetap dan sama disetiap olahan. Perempuan selain sebagai ibu rumah tangga juga dituntut untuk membantu suami mencari tambahan nafkah untuk keluarganya dalam upaya pencapaian ketahanan pangan keluarga

Kabupaten Malang adalah sebuah kabupaten di Propinsi Jawa Timur Indonesia. Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi dan merupakan kabupaten dengan populasi terbesar di Jawa Timur. Kabupaten Malang juga merupakan



kabupaten terluas ketiga di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat. Masyarakat Kabupaten Malang umumnya bertani, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan. Selama beberapa tahun Kabupaten Malang termasuk pengekspor tenaga kerja yang besar. Di wilayah Jawa Timur, pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Kabupaten Malang menempati urutan ketiga (Disnaker,2018). Para PMI terbanyak adalah perempuan. Dengan profesi sebagai Pekerja Migran, mereka berharap dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bisa menjadi masyarakat yang mandiri sehingga sudah tidak kembali menjadi Pekerja Migran lagi karena sudah membuka usaha sendiri di tempat asalnya. Kenyataannya banyak PMI-P yang mengalami perubahan gaya hidup sehingga menjadi konsumtif, hasil jerih payah mereka bukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga seperti untuk investasi atau merintis usaha produktif, setelah menjadi purna PMI-P mereka tidak lagi punya pekerjaan/mengamnggur atau tidak punya usaha sendiri sehingga menjadi beban keluarga.

II. KAJIAN LITERATUR

Ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu memiliki akses, baik secara fisik maupun ekonomis, terhadap pangan yang cukup, aman dan bergizi, untuk memenuhi kebutuhan gizi harian yang diperlukan agar dapat hidup dengan aktif dan sehat. Sejalan dengan itu dalam ketahanan pangan terdapat 3 (tiga) komponen penting pembentuk ketahanan pangan, yaitu produksi dan ketersediaan pangan, jaminan akses terhadap pangan, serta mutu dan keamanan pangan. Tonggak ketahanan pangan adalah ketersediaan atau kecukupan pangan dan aksesibilitas bahan pangan oleh anggota masyarakat. Penyediaan pangan dapat

ditempuh melalui salah satunya adalah produksi sendiri dengan memanfaatkan pengalokasian sumber daya alam. Basis dari konsep ketahanan pangan nasional adalah ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, terutama di pedesaan. Demikian pula sebaliknya, ketahanan pangan di tingkat rumah tangga merupakan prakondisi sangat penting untuk memupuk ketahanan pangan regional dan di tingkat nasional. Pada World Food Summit (1996), **ketahanan pangan** didefinisikan sebagai “Ketahanan pangan terjadi apabila semua orang secara terus menerus, baik secara fisik, sosial dan ekonomi mempunyai akses untuk pangan yang memadai/cukup, bergizi dan aman, yang memenuhi kebutuhan pangan mereka dan pilihan makanan untuk hidup secara aktif dan sehat. Pemahaman mengenai **ketahanan dan kerentanan pangan dan gizi** tercantum dalam kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi. Di Indonesia, Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan mengartikan Ketahanan Pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pilar utama untuk menjadi bangsa yang lebih maju adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan basis utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi, ketahanan nasional yang berkelanjutan. Sedangkan ketahanan pangan merupakan sinergi dari tiga pilar yaitu (i) **ketersediaan pangan**; (ii) **akses terhadap pangan** dan (iii) **pemanfaatan pangan**.

Di Negara berkembang kemiskinan dan kerawanan pangan merupakan masalah utama yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan, padahal hal tersebut merupakan prasyarat dalam memenuhi hak azasi pangan setiap manusia. Pemantapan ketahanan pangan nasional merupakan tujuan dan sasaran yang harus diwujudkan melalui kerja keras seluruh komponen



bangsa karena merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Di Indonesia, dalam usaha mewujudkan ketahanan pangan dan untuk menyatukan upaya dan gerak langkah antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan nasional, Pemerintah telah menetapkan Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2010-2014 yang menegaskan, bahwa tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang pada tingkat rumah tangga, daerah, nasional sepanjang waktu dan merata melalui pemanfaatan sumberdaya dan budaya lokal, teknologi inovatif dan peluang pasar, serta memperkuat ekonomi pedesaan dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Diterbitkan buku tersebut pada intinya adalah kebijakan umum yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sebagai tumpuan ketahanan pangan daerah dan nasional

Pemberdayaan Perempuan

Pengertian pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri (Novian dalam Ganggan, 2015)

Tujuan pemberdayaan (Novian dalam Ganggan, 2015) adalah :1) Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 2) Meningkatkan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; 3) Meningkatkan kualitas peran kemandirian

organisasi perempuan dengan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan; 4) Meningkatkan komitmen dan kemampuan semua lembaga yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender; 5) Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta perlindungan anak

Pemberdayaan perempuan berusaha menciptakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan tidak berarti bahwa perempuan harus menjadi sama seperti laki-laki, dan tidak pula berarti upaya untuk menyaingi atau melawan laki-laki. Kesetaraan gender harus dipahami dalam arti bahwa perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama, berada dalam kondisi dan mendapat kesempatan yang sama untuk dapat merealisasikan potensinya, sehingga sebagai perempuan ia dapat menyumbang secara optimal pada pembangunan bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya (Ratnasari, 2016)

Kearifan Lokal

Menurut Wahyu dalam Mukti (2010) Kearifan lokal diartikan sebagai pengetahuan lokal yang unik yang berasal dari budaya atau masyarakat setempat yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan pada tingkat local dalam bidang pertanian, kesehatan, penyedia makanan, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam dan beragam kegiatan lainnya di dalam komunitasnya.

Peran dan Pengaruh Kewirausahaan Sosial (social entrepreneurship) dalam Membangun Ekonomi perdesaan Berbasis Komoditas Lokal

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa kewirausahaan sosial menggunakan kemampuan entrepreneurship untuk melakukan perubahan sosial di masyarakat. Namun, konsep ini tidak dapat dipisahkan dari konsep kewirausahaan sendiri yang



mengharapkan profit. Jika dikaitkan dengan ekonomi perdesaan, konsep ini masih kurang berkembang. Padahal potensi komoditas lokal perdesaan masih begitu besar. Sistem yang digunakan selama ini hanya bersifat mencari keuntungan pada masing-masing pihak. Apa yang dimaksud dengan modal sosial menurut sejumlah ekonom dan sosiolog adalah kekayaan materil dan sekaligus keuntungan sosial yang didapat oleh suatu masyarakat. Konsep inilah yang ingin dibangun di perdesaan di Indonesia. Langkah-langkah Menuju Pembangunan Kewirausahaan Sosial (*social entrepreneurship*) Sebagai Solusi dalam Membangun Ekonomi perdesaan Berbasis Komoditas Lokal: (1) Menyertakan Topik Kewirausahaan Sosial ke dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Sebagai Pengembangan dari Mata Kuliah Kewirausahaan. Semakin sempitnya lapangan pekerjaan menuntut setiap orang untuk berlomba-lomba agar segera memperoleh pekerjaan yang layak bagi mereka. Sementara jumlah penduduk sudah tidak sebanding lagi dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu, perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang mencetak generasi yang siap bersaing di dunia kerja kini telah mengubah pemikiran itu dengan mempersiapkan mahasiswanya agar mampu menjadi pencipta lapangan pekerjaan bukan menjadi pencari kerja. (2) Mendirikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan Sosial, sebagai tempat dan sarana pendidikan dan pelatihan kewirausahaan sosial bagi akademisi, wirausaha, maupun masyarakat umum yang tertarik dan berminat untuk membuka usaha. (3) Memberikan Dana Hibah untuk Pendirian dan Pengembangan Bisnis Berbasis Kewirausahaan Sosial oleh Pemerintah atau Swasta. Peran serta Pemerintah tentunya sangat diperlukan dalam proses tercapainya program ini. Salah satu yang dilakukan adalah pemberian dana

hibah tentunya akan menambah modal serta dapat membantu dalam proses pelaksanaan bisnis. Hal ini dimaksudkan agar proses pendirian dan pengembangan bisnis berbasis kewirausahaan dapat berjalan. Namun, dana hibah yang banyak diberikan oleh pemerintah maupun swasta selama ini adalah dana hibah untuk pendirian maupun pengembangan bisnis secara umum. Sementara persyaratan tanggung jawab sosial usaha belum mendapat perhatian. Karena itu, pemberian dana hibah untuk usaha yang menyertakan persyaratan tanggung jawab sosial (*social entrepreneurship*) sangat perlu dilakukan dan diperbanyak untuk menambah jumlah usaha yang berbasiskan kewirausahaan sosial.

III. METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini adalah kombinasi antara *Eksploratory* dan *applied Research* yang bersifat longitudinal dengan menggunakan metode pemberdayaan *Participatory Rural Appraisal* (PRA).

Metode Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Purna Pekerja Migran-Perempuan (PMI-P) yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang. Penentuan sampel dan jumlah sampel menggunakan *Multi Stage Cluster Sampling* dan *Criterion Based Selection* Satuan sampel yang diambil adalah purna Pekerja Migran Indonesia-Perempuan (PMI-P) yang tidak bekerja dan atau tidak mempunyai usaha dengan jumlah sampel ditentukan berdasarkan survei untuk memperoleh data primer, karena belum tersedianya data sekunder tentang purna pekerja migran yang sudah menetap kembali di daerah asalnya. Kabupaten Malang terdiri dari 33 Kecamatan dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang terdiri dari 15 Desa, merupakan Kecamatan dengan



Pekerja Migran Indonesia terbanyak, Desa Druju sebagai penyumbang terbesar.

Teknik Analisis Data

Analisis terhadap kondisi purna Pekerja Migran-Perempuan (PMI-P) menggunakan metode GIS (*Geographic Information System*) dan analisis faktor dalam upaya menentukan program-program pemberdayaan purna Pekerja Migran-Perempuan (PMI-P) yang sesuai dengan kearifan lokal.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

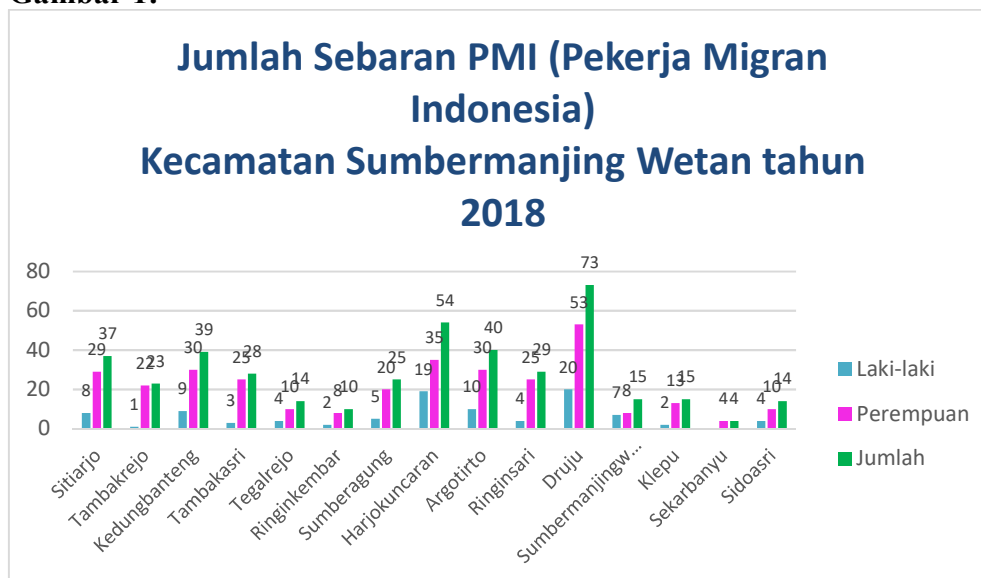
Dengan menggunakan Analisis GIS diketahui sebaran domisili purna Pekerja Migran Indonesia - Perempuan (PMI-P) di seluruh Kabupaten Malang, Penentuan sampel dan jumlah sampel menggunakan *Multi Stage Cluster Sampling* dan *Criterion Based Selection* Satuan sampel yang diambil adalah purna Pekerja Migran Indonesia-Perempuan (PMI-P) yang tidak bekerja dan atau tidak mempunyai usaha dengan jumlah sampel ditentukan berdasarkan survei.

Data awal yang digunakan untuk mengetahui sebaran domisili purna Pekerja Migran Indonesia - Perempuan (PMI-P) di seluruh Kabupaten Malang metode GIS (*Geographic Information System*) adalah data pengiriman PMI ke luar negeri yang

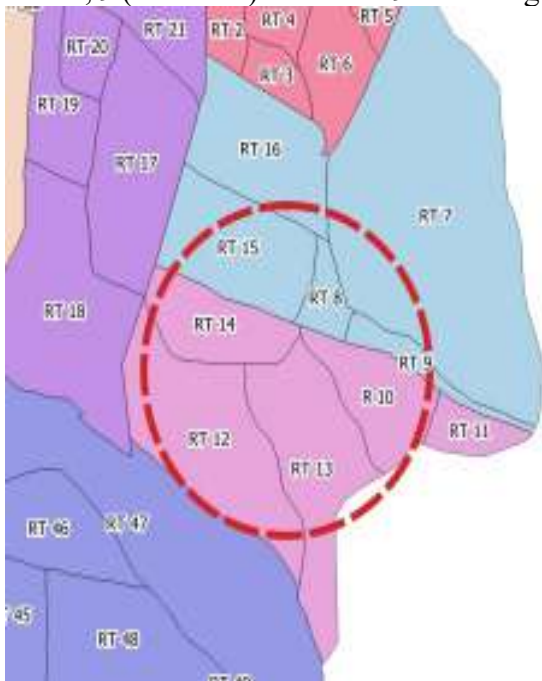
Gambar 1:

diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang yang berasal dari seluruh Kecamatan selama tiga tahun 2016-2018. Dari hasil pemetaan diketahui bahwa sebaran domisili Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Malang pada setiap kecamatan terlihat bahwa selama 3 (tiga) tahun berturut-turut Kecamatan Sumbermanjing Wetan merupakan penyumbang terbesar pengiriman PMI, sehingga ditetapkan sebagai subyek penelitian karena dapat diasumsikan **sebaran Purna Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Malang terbanyak terletak di Kecamatan tersebut.**

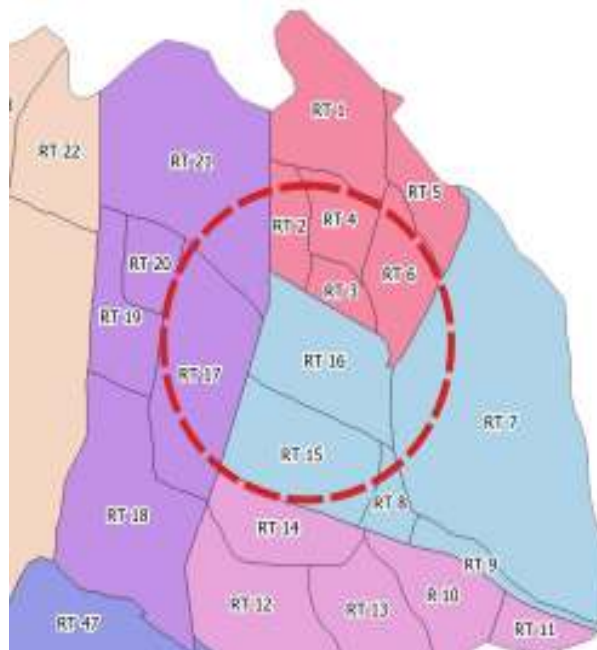
Kecamatan Sumbermanjing Wetan merupakan kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Malang. Kecamatan ini terdiri dari 15 desa. Kecamatan Sumbermanjing Wetan memiliki luas wilayah 27.218,49 Ha. Mata pencaharian utama masyarakat Sumbermanjing Wetan adalah petani dan buruh tani. Kecamatan ini memiliki sejumlah sumberdaya alam potensial seperti pertambangan, perikanan dan perkebunan. Adapun produk unggulan pertanian kecamatan ini adalah tebu, kopi, jagung, cengkih, dan lain-lain.



Dari gambar 1 di atas terlihat bahwa Desa Druju merupakan penyumbang terbesar jumlah pekerja Migran Indonesia di Kecamatan Sumbermanjing Wetan sehingga Desa Druju ditetapkan sebagai Desa Objek penelitian. Desa Druju memiliki 3 (tiga) Dusun, 9 (sembilan) RW dan 49 RT. Dengan



metode multi stage sampling maka dusun yang akan dijadikan sasaran survei adalah Dusun Krajan dengan jumlah RW dan RT terbanyak yaitu 4 RW dan 18 RT. Sedangkan dengan metode cluster RW dan RT yang jadi sasaran survei terlihat pada gambar 2 berikut



Cluster didasarkan apa kedekatan jarak antar RT, sehingga diperoleh 2 (dua) cluster, yaitu I: 7 RT yaitu RT 02, 03,04,06,15,16,17 dan Cluster II :6 RT yaitu: 08,09,10, 12,13,14 Dengan survei setiap RT di setiap cluster diperoleh sampel/responden sebanyak 91 orang

Hasil Analisis Faktor

Langkah selanjutnya adalah menyusun kuisisioner tentang pilihan usaha dan atribut-atribut yang mempengaruhi pilihan usaha tersebut berdasarkan kearifan lokal,

kemudian dilakukan analisis faktor sehingga diperoleh atribut dominan, Pilihan usaha yang ditawarkan berdasarkan kearifan lokal Desa Druju adalah Pembuatan produk olahan berbahan kain batik dan Pembuatan produk olahan berbahan jagung

Variabel mempengaruhi pilihan usaha: Tenaga kerja, Keuangan,alat produksi,bahan baku,k pembuatan, Pemasaran, Produk, Harga

Analisis faktor pilihan usaha produk olahan berbahan kain batik



Tabel 1: Total Variance Expalined – Produk Olahan Berbahan Kain Batik

Component	Initial eigenvalues			Extraction Sum of Squared Loading		
	Total	% of Values	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	5,474	68,423	68,423	5,474	68,423	68,423
2	0,570	7,130	75,553			
3	0,518	6,477	82,030			
4	0,375	4,692	86,728			
5	0,342	4,274	90,997			
6	0,297	3,709	94,706			
7	0,238	2,978	97,684			
8	0,185	2,316	100,000			

Dari tabel 1 menunjukkan ada 1 faktor terbentuk dari 8 variabel yang dimasukan karena yang mempunyai nilai eigen value lebih dari satu hanya satu ($5.474 > 1$) dengan total varians 68.423%, berarti besarnya varians yang mampu dijelaskan oleh faktor baru yang terbentuk 68.423% sisanya 31.577% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Diperoleh persamaan fungsi faktor terbentuk $F = f(\text{Fac}_1)$.

Analisis faktor pilihan usaha produk olahan berbahan Jagung

Dari tabel 2 menunjukkan ada 2 (dua) faktor terbentuk dari 8 (delapan) variabel yang dimasukan karena yang mempunyai nilai eigen value lebih dari satu ada dua ($5.203 > 1$) dan ($1.006 > 1$) dengan total varians 77.609%, berarti besarnya varians yang mampu dijelaskan oleh faktor baru yang terbentuk 77.609 % sisanya 22.391% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Persamaan fungsi faktor terbentuk: $F = f(\text{Fac}_1 + \text{Fac}_2)$

Tabel 2. Total Variance Expalined – Produk Olahan Berbahan Jagung

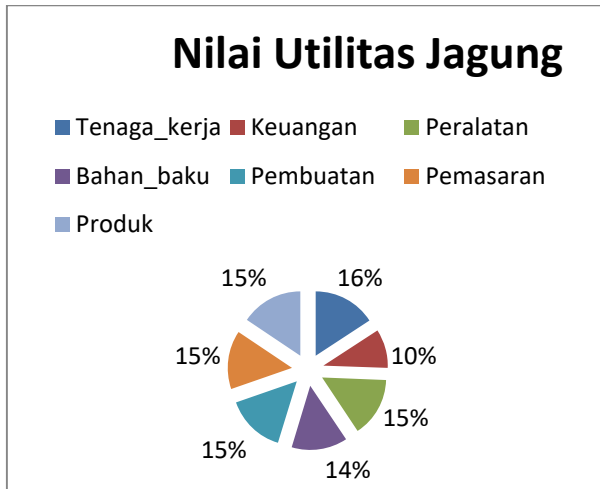
Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cummulative %
1	5,203	65,038	65,308	5,203	65,038	65,038	3,151	39,386	39,386
2	1,006	12,571	77,609	1,006	12,571	77,609	3,058	38,223	77,609
3	0,529	6,619	84,228						
4	0,391	4,886	89,114						
5	0,326	4,702	93,186						
6	0,219	2,737	95,923						
7	0,168	2,105	98,029						
8	0,158	1,971	100,000						

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil Analisis Faktor Pilihan Usaha Produk Olahan Berbahan Kain Batik

Sesuai dengan sebaran nilai utilitas (utilitas total 12477) yang diberikan oleh responden pada setiap variabel yang mempengaruhi responden memilih produk olahan berbahan kain batik, variabel keuangan dan harga merupakan variabel yang mempunyai nilai rendah (9%) dibandingkan nilai variable

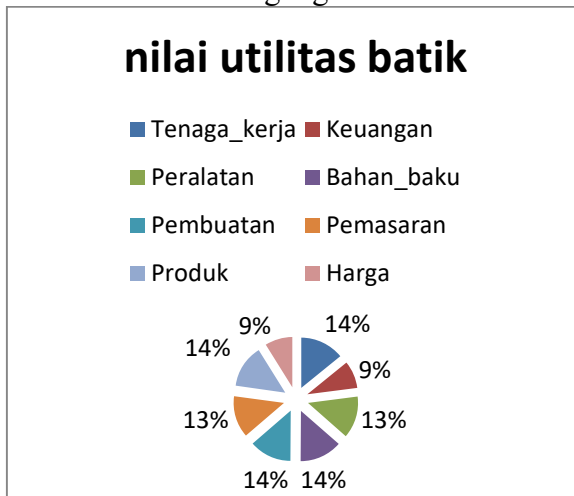
lain, hal ini berarti penentuan harga jual dan kebutuhan dana atau modal menjadi pertimbangan/perhatian lebih dari responden, terlihat di gambar 3 di bawah ini **Gambar 3.** Nilai Utilitas Produk Olahan Berbahan Kain Batik



Sumber: Data primer diolah,2019

Pilihan Usaha Produk Olahan Berbahan Jagung

Gambar 4. Nilai Utilitas Produk Jagung Olahan Berbahan Jagung



Sumber: Data primer diolah,2019

Sesuai dengan sebaran nilai utilitas (total utilitas 12229) yang diberikan oleh responden pada setiap variabel yang mempengaruhi responden memilih usaha produk olahan berbahan jagung variabel keuangan variabel yang mempunyai nilai paling rendah (10%) dibandingkan nilai variabel lain, hal ini berarti kebutuhan dana/modal menjadi pertimbangan/perhatian utama dari responden, terlihat pada gambar 4 di atas.

Dari nilai total utilitas menunjukkan bahwa nilai utilitas usaha produk olahan

berbahan kain batik lebih tinggi daripada nilai utilitas usaha produk olahan berbahan jagung sehingga dapat disimpulkan responden lebih memilih usaha produk olahan berbahan kain batik .

IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN

UU No 6 tahun 2004 merupakan bentuk upaya Negara untuk menjamin pemerataan pembangunan smpa ke desa. Posisi desa menjadi strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan sehingga desa menjadi kuat, maju dan mandiri dan dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. UU Desa menumbuhkan semangat baru bagi penyelenggara pemerintahan desa untuk bekerja keras membangun desa dan warganya, maka sangat dibutuhkan Penyelenggara pembangunan (pemerintahan desa) yang mampu memahami kondisi desa juga dan mampu menentukan keputusan dalam mengurus pembangunan dan masyarakat.

Penyelenggaran pemerintahan desa harus berorientasi pada tindakan untuk mewujudkan cita-cita kemandirian melalui pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, yang didukung dengan cara berpikir yang maju dan memiliki karakter pemerintahan yang kreatif, dan inovatif untuk kepentingan masyarakat desa. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya desa digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan warga desa, haruslah dirasakan oleh semua unsur masyarakat termasuk bagi kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah desa dapat meggerakan pembangunan desa dengan memanfaatkan semua aset desa atau potensi desa yang ada sehingga mampu memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat dan pembangunan desa secara berkelanjutan.



Keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa merupakan sebuah proses pendewasaan cara berpikir dan tindakan nyata perempuan untuk membangun desa. Pemerintah desa dalam Pengelolaan sumberdaya yang ada di desa, haruslah memperhatikan peran atau keterlibatan perempuan sehingga mampu memberikan kontribusi positif dalam pemanfaatannya terutama dalam pergerakan ekonomi lokal mencari tambahan pendapatan untuk keluarganya. Perempuan tidak sekedar mengurus mengurus rumah tangga tetapi juga masuk pada urusan publik dan domestik, misalnya kegiatan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan kepemimpinan perempuan lainnya yang terakomodir dalam kegiatan PKK.

Perempuan pedesaan sangat tergantung hidupnya pada lingkungan alam yang ada disekitar mereka untuk dapat memenuhi kelangsungan hidup mereka dan juga keluarga. Namun pada kenyataannya banyak aktivitas sumberdaya desa yang tidak memperdulikan peran perempuan sehingga semakin hilangnya akses dan kontrol perempuan terhadap sumberdaya yang ada didesa dan terpinggirkan dari proses pembanguann. Terkait dengan aset atau sumberdaya keuangan desa, kaum perempuan tidak banyak dilibatkan dalam penyusunan dan pengambilan keputusan anggaran, sebenarnya perempuan punya hak untuk mendapatkan alokasi anggaran yang memadai sebagai upaya peningkatan kesejahteraan perempuan. Kondisi tersebut menyebabkan banyak perempuan desa bekerja ke luar daerah bahkan ke luar negeri. Sebagaimana halnya dengan Perempuan yang ada di Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Desa Druju adalah salah satu Desa di Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk potensi sumber daya alam utama jagung. Jumlah penduduk perempuan

lebih banyak dibandingkan penduduk laki laki dan tingkat pendidikan terbanyak Sekolah Dasar (SD). Selama bertahun tahun Desa Druju menjadi penyumbang terbesar pengiriman pekerja migran indonesia perempuan di Kabupaten Malang, sehingga di Desa Druju banyak ditemukan purna Pekerja Migran Indonesia terutama perempuan. Dari hasil survei diperoleh data 91 orang purna Pekerja Migran Perempuan yang semuanya tidak bekerja dan tidak mempunyai usaha. Berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki Desa Druju, peneliti menawarkan dua pilihan usaha yaitu pengolahan produk olahan berbahan batik dan produk olahan berbahan jagung. Dengan analisis faktor diperoleh hasil bahwa faktor terbentuk usaha pengolahan produk berbahan batik hanya satu faktor, berarti seluruh variabel pilihan usaha tersebut mempunyai keeratan hubungan antara variabel satu dan variabel lainnya dan nilai utilitas total usaha pengolahan produk berbahan batik lebih tinggi daripada nilai total utilitas pengolahan produk berbahan jagung sehingga dapat disimpulkan bahwa responden (perempuan purna pekerja migran) Desa Druju lebih memilih usaha pengolahan produk berbahan batik.

Menurut Srihartini (2003) Pemberdayaan masyarakat diartikan upaya meningkatkan harkat martabat lapisan masyarakat dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, sedangkan menurut Wibowo dalam pemberdayaan perempuan adalah pembekalan, peningkatan serta pembinaan potensi atau aktualisasi perempuan sehingga lebih mampu mempergunakan kesempatan yang ada, mampu berperan serta secara aktif dan mampu menjadi mitra kaum laki-laki dalam mengisi pembangunan. Tujuan utama



pemberdayaan (Suharto,2014) adalah memperkuat kekuasaan masyarakat kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, yaitu kelompok: a) Lemah Struktural karena gender atau etnis (b) Lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing (c) Lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.

Perempuan sebagai ibu rumah tangga selain perannya membantu suami mencari tambahan nafkah untuk keluarganya juga bertanggungjawab terhadap pengelolaan ekonomi keluarga. Mereka selalu berusaha dengan berbagai keterbatasan mengelolanya sehingga keluarganya tetap bisa makan layak dan bertahan hidup. Dapat dikatakan perempuan mempunyai peran penting dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan keluarga (Yuniriyanti,2017)

Implementasi hasil penelitian adalah dengan menentukan strategi pemberdayaan yang tepat untuk para perempuan purna pekerja migran Desa Druju. Menurut Suharto (2014) Strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*) yaitu: a) Aras Mikro, pemberdayaan dilakukan secara individu melalui bimbingan dan konseling. b) Aras Mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan dan sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. c) Aras Makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas.

Berdasarkan modal pemberdayaan yang dimiliki oleh Desa Druju, maka strategi

pemberdayaan perempuan purna pekerja migran yang sesuai adalah strategi Aras Mezzo, karena tujuan pemberdayaan adalah terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUB) produk olahan berbahan batik.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hendaknya perempuan ditempatkan sebagai subyek bukan sebagai obyek. Perempuan harus diakui sebagai diri pribadi yang merdeka, untuk bisa mengembangkan segala potensi yang dimilikinya sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi dan kodratnya. Pemberdayaan perempuan diupayakan dengan memberi kesempatan seluas-luasnya pada perempuan dalam mengembangkan kemampuan, ketrampilan dan keahliannya. Hal ini dapat dimaklumi karena perempuan pada masa pembangunan ini tidak hanya sebagai istri dari atau ibu dari anak-anaknya, melainkan wanita sebagai warga negara atau anggota masyarakat yang turut berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara sebagai sumber daya manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kemenristek Dikti yang telah memberikan dana hibah kepada peneliti sehingga penelitian tentang Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia bisa dilaksanakan.

REFERENSI

- Balady Ashfin. 2018. **Aktualisasi Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Komunitas** (Studi Kasus Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman). Skripsi: Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- BNP2TKI. 2015. <http://m.suaramerdeka.com>. Diakses tanggal 26 Februari 2017



- Coleman, J. (1999). *Social Capital in the Creation of Human Capital*. Cambridge Mass: Harvard University Press.
- Dees, J.G. 1998. The Meaning of “Socio Entrepreneurship”. Fitriati, R. *Socio Entrepreneurship- Kewirausahaan Sosial*. Presentasi Fisip UI.
- FAO. 1996. *World Food Summit*, 13-17 November 1996. Rome, Italy: Food and Agriculture Organisation of the United Nations.
- Ganggan, Ganjar R:Roni, Mukron. 2015. *Pemberdayaan Perempuan Melalui Daya Saing Produk Berbahan Ramah Lingkungan (Go Green) Di UKM Palembang*. *Jurnal Ilmiah MbiA Vol.14 No.1 April 2015:31-34*
- Kartasmita, G. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat. Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta. CIDES
- Mardikanto, Totok: Subianto Poerwoko. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung. Alfabeta
- Mukti, Abdul. 2010. *Beberapa Kearifan Suku Dayak Dalam Mengelola Sumberdaya Alam*. Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2012 Tentang *Pemberdayaan Masyarakat Yang Akan Menjadi Calon Dan Purna Tenaga Kerja Indonesia*
- Ratnasari, Dwi. 2016. *Pemberdayaan Perempuan Dalam Pendidikan Pesantren*. *Jurnal ‘Anil Islam, Vol 9, Nomor 1, Juni*
- Republik Indonesia. 2002. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2000 Tentang Ketahanan Pangan*. Jakarta: Sekretaris Negara RI.
- Santosa, A. 2008. *Konservasi Indonesia, Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan*. Bogor. Pokja Kebijakan Konservasi.
- Sri Hartini. 2003. *Pondok Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. *Jurnal PMI September, hal 45*
- Supriono, Flassy dan Rais (2008). *Modal sosial: definisi, dimensi, dan tipologi*. *Proceedings of Conference in Business, Accounting and Management*, p 131-144
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Yogyakarta. Buku Beta
- _____. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Syabra, R. 2003. *Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi*. *Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol V, No 1:1-5*
- UU No. 18 Tahun 2017 Tentang *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*
- Wijayanti, Kesi. 2011. *Model Pemberdayaan Masyarakat*. Semarang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, volume 12 Nomor 1*
- Yuniriyanti, Eny. 2017. *The Development Model of Woman Empowerment in Order to Increase Family’s Food Tenacity*. *JESP-Vop 9, No.1, March 2017*